



Tersedia secara online pada

<https://jurnalpradah.blitarkab.go.id/>


Meningkatkan Akuntabilitas Publik melalui Tata Kelola Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Sekar Kabupaten Bojonegoro

Ringga Ananta Putra ¹, Denny Iswanto ²

Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia¹

Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Indonesia ²

flawless666x@gmail.com

Abstract

Digital transformation in government organizations has encouraged various central, regional, and village government entities to continuously develop electronic-based government systems. At the village level, the Sistem Informasi Desa (SID), or Village Information System platform has been provided through village websites to deliver digital public services and serve as an information medium for the wider community. However, this initiative faces several challenges, including the low digital literacy of village government officials, which hinders organizational performance and public accountability, as observed in Sekar Village, Bojonegoro Regency. Village operators and officials have not yet fully understood how to manage the village website to support digital public accountability. This community service activity aimed to enhance digital accountability in village governance through capacity building for village operators and officials in managing the village website. The study employed a participatory research approach, in which researchers were directly involved in facilitating and guiding the knowledge transfer process for sustainable website management. The assistance process included problem identification, collection of village profile data, planning and budgeting documents, and other supporting documents. Subsequently, data editing and website management mentoring were carried out for the village operators. The results indicate a significant improvement in digital accountability through the village website (<https://sekar-bjn.desa.id/>), as various public information menus have been successfully populated, including village profiles, development planning documents, and village budget information. It is expected that this community service initiative will encourage the regular and sustainable management of the village website in the future.

Keywords: accountability; village information system; village governance.

INFORMASI ARTIKEL

Putra, R.A. & Iswanto, D. (2026). Meningkatkan Akuntabilitas Publik melalui Tata Kelola Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Sekar Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Perspektif Pembangunan Daerah*, 03 (01), 1-13.

<https://doi.org/10.66151/jurnalpradah.v3i1.22>

© The Author(s)

JURNAL PERSPEKTIF PEMBANGUNAN DAERAH

Dipublikasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Pemerintah Kabupaten Blitar, Indonesia

Alamat: Jalan Semeru No. 40, Kota Blitar – Provinsi Jawa Timur 66117

Telepon: (0342) 808165

E-mail: jurnalpradah@blitarkab.go.id

Abstrak

Transformasi digital pada organisasi pemerintahan menjadikan sejumlah entitas pemerintah pusat, daerah dan desa terus membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pada pemerintah desa, telah disediakan platform Sistem Informasi Desa (SID) melalui website desa untuk dapat memberikan pelayanan secara digital kepada masyarakat sekaligus sebagai wadah informasi bagi masyarakat luas. Upaya ini mengalami berbagai kendala seperti rendahnya literasi digital aparatur pemerintah desa sehingga menghambat kinerja dan akuntabilitas publik, salah satunya di Desa Sekar Kabupaten Bojonegoro. Operator dan Perangkat Desa belum sepenuhnya memahami pengelolaan website desa dalam menunjang akuntabilitas Publik secara digital. Tujuan kegiatan pengabdian melalui pendampingan pengelolaan website desa adalah untuk dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa secara digital melalui pengembangan kapasitas Operator Desa dan Perangkat Desa Sekar. Penelitian ini menggunakan pendekatan *partisipatory reseach*, Dimana peneliti berperan langsung dalam mengarahkan dan mendampingi proses transfer knowledge dalam pengelolaan website desa secara berkelanjutan. Pendampingan dilakukan dengan proses identifikasi masalah, pengumpulan data profil, dokumen perencanaan dan penganggaran dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian dilakukan proses editing data dan pendampingan pengelolaan website kepada operator desa. Hasilnya menunjukkan terdapat perubahan signifikan terhadap akuntabilitas digital desa melalui website desa (<https://sekar-bjn.desa.id/>) dimana telah terisi berbagai menu informasi publik yang ditampilkan didalamnya seperti profil desa, dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran desa. Diharapkan dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini pengelolaan website desa dapat dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Kata Kunci: akuntabilitas; sistem informasi desa; pemerintahan desa.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, penerapan teknologi informasi terus dimanfaatkan oleh sebagian besar organisasi, khususnya organisasi publik. Adopsi teknologi informasi membawa berbagai manfaat, termasuk peningkatan efisiensi, aksesibilitas informasi, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan komunikasi yang lebih cepat (Cahyono et al., 2023). Teknologi juga memberikan pengaruh besar dalam dunia pemerintahan, dimana adanya konsep *electronic-government* (E-Gov) yang terbukti memberikan dampak signifikan dalam menunjang kinerja dan akuntabilitas pemerintah, baik pusat maupun daerah (Rolania Batubara & Helmy, 2019). Selain itu, implementasi teknologi informasi dalam pemerintahan juga memperkuat akuntabilitas dengan memungkinkan pelacakan kinerja, transparansi penggunaan anggaran, serta kemudahan dalam pengawasan oleh publik dan pemangku kepentingan.

Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas memiliki peran utama dalam memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada masyarakat. Peningkatan tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas dipandang sebagai respon terhadap kompleksitas permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh pemerintah (Riwukore et al., 2022). Menurut teori akuntabilitas publik, pemerintah sebagai agen memiliki kewajiban untuk memberikan laporan, penjelasan, dan justifikasi atas setiap tindakan serta penggunaan sumber daya kepada masyarakat sebagai prinsipal, sehingga tercipta hubungan yang transparan, dapat diawasi, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam organisasi publik, akuntabilitas bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga fondasi bagi pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan publik yang efektif. Pelayanan publik yang efektif perlu untuk dilakukakan pembenahan secara berkelanjutan atas sistem, proses dan sumber daya yang ada, baik dalam skala pusat, daerah sampai dengan pemerintahan desa (Iswanto, 2021b).

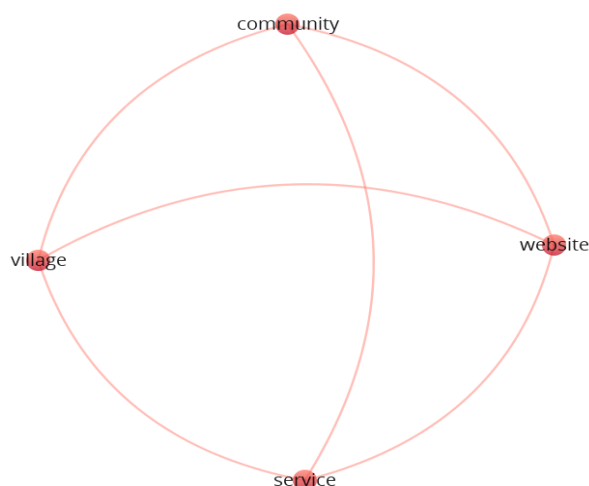
Salah satu daerah dengan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan *E-Gov* adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu sejak tahun 2016 sampai saat ini telah mengalami perkembangan (Sari et al., 2022). Komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tercermin dari berbagai program yang telah dijalankan seperti *Smart City*, *Open Government*, portal satu data, sampai dengan digitalisasi pemerintaha desa melalui Sistem Informasi Desa (SID). SID merupakan instrumen berbasis digital untuk mengelola informasi dan menyediakan layanan *online* terkait urusan pemerintahan desa seperti administrasi kependudukan, pelaporan, perencanaan, pengelolaan aset, pelayanan publik, penganggaran, dan lain sebagainya (Iswanto, 2022). Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang efisien dalam waktu, biaya dan proses yang, akuntabel, dan efektif (Praseptiawan, Dwi Nugroho, et al., 2021a). Hal tersebut sejalan dengan konsep *good governance* yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan

partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik (Landa & Greenberg, 2024; Madjid, 2024). Penerapan SID merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Penerapan SID sebagai wujud pelaksanaan SPBE sampai tingkat desa (Iswanto & Putra, 2023).

SID di Kabupaten Bojonegoro telah diimplementasikan di 419 desa dan 11 kelurahan, namun pemanfaatannya masih belum optimal. Sebagian besar SID tidak dijalankan dengan aktif untuk dapat memberikan informasi kepada publik mengenai kinerja pemerintahan. Operator desa kurang memahami peranannya dalam mengelola *website* desa, mengupdate data perencanaan, kinerja dan informasi lain sebagai salah satu *tools* dalam meningkatkan akuntabilitas mereka. Selain itu, literasi digital aparatur pemerintah desa yang rendah menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan tata kelola SID melalui *website* desa (Iswanto, 2021a). Kurang maksimalnya kinerja SID yang telah difasilitasi pemerintah daerah menjadi isu krusial dimana SID ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat desa setempat untuk dapat mengakses layanan secara online.

Salah satu desa yang memanfaatkan SID adalah Pemerintah Desa Sekar, Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro yang secara umum telah memanfaatkan *platform* website desa melalui laman (<https://sekar-bjn.desa.id/>) untuk mengupdate kegiatan pemerintahan. Berdasarkan observasi Penulis, pemanfaatan SID di Desa Sekar belum menjangkau secara penuh akuntabilitas kegiatan pemerintahan. Beberapa fitur yang telah disediakan masih banyak yang kosong dan belum adanya updating data terutama pada menu profil desa, potensi desa, dokumen perencanaan pembangunan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Penelitian terkait tata kelola SID memang sudah banyak dilakukan akan tetapi belum spesifik ke arah pendampingan yang dilakukan secara bertahap dan jarang dilakukan monitoring. Pengabdian yang telah dilakukan mengenai SID selama ini hanya berfokus pada profil pemerintah desa, pelayanan, masyarakat dan pengelolaan *website* desa dari aspek TI, belum sampai ke konten (Aditya Putra et al., 2022; Julkarnain et al., 2023; Kurniawan et al., 2021; Praseptiawan et al., 2021b; Prihatiningtyas et al., 2020; Putra & Atmaja, 2021; Sumanjoyo Hutagalung et al., 2020; Surahman et al., 2023; Tri Wijayati Wardoyo et al., 2019).



Gambar 1 Jurnal Pengabdian Masyarakat tentang SID

Sumber: Data Penulis (2024)

Gambar di atas menunjukkan visualisasi gap penelitian dan pengabdian melalui aplikasi VOSviewer. Peneliti melakukan analisis *co-word* (kata kunci) dengan menggunakan aplikasi VOSviewer untuk mengolah dan memvisualisasikan data untuk memperoleh peta pembahasan topik penelitian terdahulu. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dari sepuluh kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, terdapat empat kata kunci utama dalam pengabdian tersebut, yaitu *community* (masyarakat), *village* (Desa), *service* (pelayanan), dan *website*, dan fokusnya hanya pada pengelolaan secara teknis websitenya pada aspek pelayanan, transformasi digital, pengoperasian, dan literasi digital (Fitri et al., 2021; Hertati et al., 2022; Iswanto, 2022; Iswanto et al., 2024; Mardinata et al., 2023; Praseptiawan, Nugroho, et al., 2021; Rasyid & Rahmawati, 2023; Supiyandi et al., 2022). Sehingga penelitian ini mempunyai pembeda, yaitu pengelolaan website desa dalam meningkatkan

akuntabilitas publik atas kinerja yang telah dilakukan dan juga pendampingan pembuatan konten yang menarik. Melalui kegiatan pelatihan untuk perangkat dan operator desa yang Penulis lakukan sebagai salah satu bentuk Pengabdian Masyarakat, diharapkan dapat bermanfaat dalam membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Participatory Research* (penelitian partisipatoris) untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait kendala tata kelola website desa. Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif peneliti bersama pemangku kepentingan dalam proses penelitian guna menghasilkan pengetahuan praktis yang dapat digunakan untuk mendorong perubahan (Ashoumi et al., 2023). Penelitian dilaksanakan di Desa Sekar, Kabupaten Bojonegoro, yang dipilih karena masih belum optimalnya pengelolaan dan pemahaman operator desa dan aparat pemerintah terkait tentang pentingnya pengelolaan website desa dalam meningkatkan akuntabilitas melalui SID. Desa ini dinilai representatif dalam menggambarkan tantangan implementasi teknologi informasi di tingkat desa.

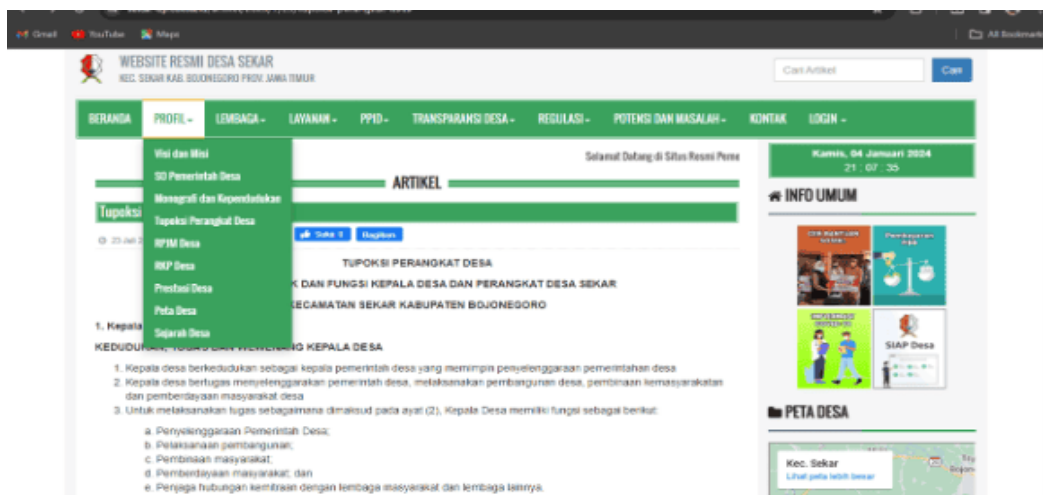
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman dan kendala yang dihadapi oleh informan, sedangkan observasi dilakukan dengan mengikuti langsung proses pengelolaan website desa serta kegiatan pendampingan yang dilakukan peneliti. Dokumentasi meliputi pengumpulan data berupa konten website desa, laporan kegiatan, dan dokumen kebijakan terkait. Informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan website desa, seperti operator desa dan aparat pemerintah desa terkait. Jumlah informan kunci dalam penelitian ini sebanyak 6 (enam) orang, yang dianggap telah mewakili kebutuhan data penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles et al., 2014). Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian, dilakukan uji validitas data melalui teknik triangulasi, yang mencakup triangulasi sumber (membandingkan data antar informan), triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta triangulasi waktu selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Selain itu, dilakukan *member checking* untuk memastikan kesesuaian antara hasil interpretasi peneliti dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif serta rekomendasi praktis dalam meningkatkan tata kelola website desa guna mendukung akuntabilitas pemerintahan desa secara digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian ini dilakukan dengan melihat masalah yang dihadapi pemerintah desa yaitu kurangnya pengetahuan tata kelola *website* desa sebagai salah satu *tools* dalam meningkatkan akuntabilitas publik secara digital. Pengabdian ini dilakukan dengan pendampingan langsung yang dilakukan dengan operator desa untuk dapat mengelola, memperbaiki dan *mengupdate* data secara berkala tentang website desa dari tiga aspek utama yaitu profil desa, perencanaan pembangunan desa, dan juga kelembagaan desa.

A. Tata Kelola Profil Desa

Tata kelola akuntabilitas profil desa merujuk pada rangkaian praktik dan prosedur yang digunakan oleh pemerintah desa untuk memastikan transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan SID dalam pelayanan publik. Pada kegiatan ini, pengabdian dilakukan dengan menyusun draft profil desa. Penyusunan draft profil desa pasca kegiatan pengabdian ini mendapatkan respon yang positif dari pihak kepala desa beserta aparat. Dalam kegiatan ini, bisa dilihat bahwa pihak desa sangat terbantu dengan adanya program kerja penyusunan draft profil desa pada website desa. Pasca kegiatan pengabdian juga terlihat bahwa *website* desa yang sebelumnya terbelengkalai menjadi terupdate, khususnya terkait menu “profil desa”. Pada menu “profil desa” sudah terisi beberapa data diantaranya Struktur Organisasi Pemerintah Desa, Tupoksi Perangkat Desa, dan Sejarah Desa.



Gambar 2 Menu Profil pada Website Desa Sekar

Sumber: Pemerintah Desa Sekar (2023)

Gambar di atas menggambarkan secara visual Struktur Organisasi Pemerintah Desa, Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Perangkat Desa, serta Sejarah Desa yang telah tercantum dalam situs web resmi desa. Pencantuman informasi tersebut merupakan suatu upaya sistematis dan strategis dalam mengelola identitas desa (Rosmalina et al., 2023). Pemilihan untuk menampilkan Struktur Organisasi Pemerintah Desa memberikan gambaran yang jelas terkait hierarki dan fungsi masing-masing unit di dalam pemerintahan desa. Sementara itu, penjelasan Tupoksi Perangkat Desa menyajikan rincian tugas dan fungsi dari setiap perangkat pemerintahan, memperkuat pemahaman masyarakat tentang peran dan tanggung jawab masing-masing individu.

Lebih lanjut, penyertaan Sejarah Desa dalam SID tersebut tidak hanya memenuhi fungsi dokumentasi historis, tetapi juga berperan sebagai sarana edukasi yang memberikan pemahaman mendalam tentang perkembangan dan peristiwa penting yang membentuk identitas desa (Sugianto, 2023). Tindakan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjalin koneksi historis dengan masa kini, serta menjadikan informasi tersebut dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Dengan demikian, pencantuman elemen-elemen tersebut di dalam situs web desa tidak hanya menjadi representasi visual yang informatif, melainkan juga menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran dan memperkuat ikatan identitas desa di kalangan masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan pengabdian yang dilakukan oleh Hariono et al. (2020) dimana kegiatan ini bermanfaat dalam membangun kesadaran aparatur desa dalam penyebaran informasi desa secara tepat, cepat dan menyeluruh melalui *website* dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan suatu informasi.

Selain itu, dalam konteks penampilan profil desa, disarankan untuk memasukkan gambaran visual tentang aparat pemerintahan desa, dengan tujuan memberikan informasi dan memperlihatkan identitas pejabat desa yang memiliki kewenangan. Tindakan ini diperlukan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sosok-sosok pejabat yang menjabat pada posisi tertentu, sehingga jika ada kebutuhan layanan, mereka dapat mengetahui secara jelas pejabat yang harus dihubungi. Informasi yang ditambahkan meliputi profil kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala bagian, dan lima profil kepala dusun yang sedang menjabat. Penyelenggaraan pemerintahan desa memerlukan kejelasan mengenai individu-individu yang memiliki tanggung jawab dan peran kunci dalam memimpin dan mengelola berbagai aspek pembangunan di tingkat desa. Pembangunan desa akan berkembang sehat di bawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas, memiliki legitimasi dan dipercaya oleh masyarakat (Suryani, 2019)

Langkah ini menunjukkan transparansi dalam menghadirkan identitas dan peran masing-masing pejabat desa, yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait mengenai struktur kepemimpinan desa. Dengan demikian, penyajian profil tersebut di dalam gambar tidak hanya memberikan informasi terinci, tetapi juga berkontribusi pada upaya menciptakan keterbukaan dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa. Hal ini sejalan dengan pengabdian yang dilakukan oleh Pujihartati et al. (2022) dengan hasil yaitu operator desa desa mampu memetakan informasi apa saja yang akan ditampilkan dan dipublikasikan di website profil desa. Website desa digunakan sebagai sarana akuntabilitas dan transparansi serta promosi potensi desa.

Selain itu, telah dilakukan pendampingan penyusunan buku profil desa. Profil desa memiliki fungsi untuk dapat melengkapi dan memperbarui data desa serta bermanfaat untuk pengembangan desa (Harjanti, 2020). Buku profil desa merupakan dokumen identitas desa yang berisi kondisi eksisting desa berupa aspek monografi dan demografi, potensi desa meliputi potensi sumber daya dan kebudayaan dan profil pemerintahan desa. Pada aspek monografi, telah dilaksanakan pendampingan dalam menyusun Monografi dan Kependudukan Desa Sekar. Dokumen ini mencakup potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, dan potensi sarana dan prasarana. Pada aspek demografi, pendampingan dilakukan dengan melaksanakan penyusunan kelengkapan dokumen demografi Desa Sekar yang mencakup perkembangan kependudukan, ekonomi masyarakat, struktur mata pencaharian menurut sektor, penguasaan aset ekonomi masyarakat, dan pemilik aset ekonomi lainnya.

Pada aspek profil tugas pokok dan fungsi perangkat desa telah dilakukan pendampingan dengan melaksanakan penyusunan kelengkapan dokumen tugas pokok dan fungsi kepala desa di Desa Sekar yang mencakup kedudukan, tugas, dan wewenang kepala desa serta tugas dan fungsi sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pelayanan, dan kepala dusun. Pada aspek potensi desa, telah dilakukan pendampingan dalam memetakan potensi desa yang di dalamnya mencakup potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tata kelola profil desa ini perlu dilakukan guna mewujudkan pemerintahan desa berprinsipkan *Good Governance*, yang salah satu indikatornya adalah transparansi segala aspek pemerintahan. Melalui upaya-upaya ini, tata kelola profil desa tidak hanya menjadi alat untuk memenuhi prinsip-prinsip *Good Governance*, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Transparansi dalam aspek pemerintahan desa akan membuka ruang untuk dialog yang lebih baik antara pemerintah desa dan masyarakat, menciptakan kondisi yang mendukung terwujudnya pemerintahan desa yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Putu & Widanti, 2022).



Gambar 3 Pendampingan Penyusunan Poster Potensi Pariwisata dan Kebudayaan Desa Sekar

Sumber: Olahan Penulis (2023)

Di samping potensi sumber daya alam dan manusia, Desa Sekar juga memiliki potensi kebudayaan, salah satunya adalah Nyadran. Gambar 3 menunjukkan bahwa upaya pendampingan yang telah dilakukan penulis tidak terbatas pada aspek tata kelola *website* desa semata, melainkan juga melibatkan pembuatan konten berupa poster dan artikel. Dalam konteks ini, pendampingan tidak hanya difokuskan pada pengelolaan teknis *website* desa, tetapi juga secara substansial melibatkan pengembangan materi informasi yang bersifat promotif terkait potensi pariwisata dan kebudayaan desa. Dengan mencakup pembuatan konten berupa poster, pendampingan tersebut bersifat visual dan dapat efektif dalam mempresentasikan daya tarik pariwisata serta kekayaan kebudayaan desa kepada masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan pengabdian yang dilakukan oleh (Airlangga & Abdullah, 2020) menyatakan bahwa *website* desa di era digital mempermudah penyebaran informasi mengenai berbagai hal termasuk memasarkan tempat wisata berbasis *E-Tourism*. Dapat disimpulkan bahwa SID dapat memberikan dampak yang signifikan apabila dikelola dengan baik dan berkelanjutan.

Pendampingan ini juga melibatkan pembuatan artikel yang mendalam, yang secara lebih rinci menguraikan potensi pariwisata dan kebudayaan desa. Artikel tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang aspek-aspek unik

dan menarik yang dimiliki oleh desa. Dengan demikian, gambaran yang tergambar menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan memiliki dimensi yang lebih luas, memadukan aspek teknis pengelolaan *website* dengan pengembangan konten informatif dan promosional demi memajukan potensi pariwisata dan kebudayaan desa secara holistik.

B. Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa

Akuntabilitas perencanaan pembangunan desa adalah aspek penting dalam memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan dilakukan dengan transparansi, keterbukaan, dan adanya sistem pertanggungjawaban. Hal ini mencakup seluruh siklus perencanaan, mulai dari identifikasi masalah hingga implementasi dan evaluasi program. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa (Ariadi, 2019). Terdapat beberapa jenis dokumen perencanaan Pembangunan desa diantaranya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Dokumen perencanaan pembangun desa tersebut harus dipublikasikan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa kepada publik.



Gambar 4 Muatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Sekar pada Website Desa

Sumber: Pemerintah Desa Sekar (2023)

Gambar 4 di atas menunjukkan bahwa setelah adanya pelatihan dan pendampingan, terdapat *update* data pada menu profil desa pada pilihan subkategori RPJM Desa dan RKP Desa. Pendampingan dilakukan untuk dapat menampilkan dokumen perencanaan desa tersebut agar dapat diakses oleh publik sebagai salah satu bentuk transparansi.

Selain dokumen perencanaan, transparansi juga perlu dilaksanakan terkait dengan anggaran desa melalui APBDDes. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan prinsip transparansi dalam mengelola keuangan (Mais & Palindri, 2020). Peranan strategis akuntabilitas APBDDes adalah sebagai pertanggungjawaban keuangan kepada publik, sebagai bentuk transparansi, pengendalian resiko dan pencegahan korupsi, dan juga sebagai pemantauan kinerja pemerintah desa (Ira Megasyara & Amrizal Imawan, 2023). Dengan demikian, akuntabilitas APBDDes menjadi landasan penting untuk menciptakan pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan bertanggungjawab kepada masyarakatnya.

Gambar 5 di bawah ini menunjukkan bahwa terdapat *update* data terkait dengan APBDDes setelah dilakukan pendampingan pengelolaan website desa. Transparansi anggaran menjadi penting karena memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang akurat dan terkini mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Pembaruan data terkait APBDDes ini merupakan hasil dari pendampingan dalam pengelolaan website desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi yang disajikan kepada masyarakat.

Dalam konteks transparansi anggaran, pembaruan data APBDDes menjadi esensial karena memberikan akses yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat untuk memahami alokasi dana desa, penggunaannya, dan dampaknya terhadap pembangunan desa. Dengan menyajikan informasi yang terkini, website desa menjadi sarana yang efektif dalam memberikan gambaran menyeluruh tentang pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat luas. Transparansi anggaran juga menciptakan dasar bagi partisipasi aktif masyarakat

dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Dengan mengetahui secara rinci bagaimana dana APBDes digunakan, masyarakat dapat lebih mudah memberikan masukan, mengajukan pertanyaan, dan melibatkan diri dalam pemantauan kinerja pemerintahan desa. Oleh karena itu, pembaruan data terkait APBDes melalui pendampingan pengelolaan *website* desa tidak hanya mendukung transparansi, tetapi juga mengukuhkan peran partisipatif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan desa.

Transparansi Anggaran

12 Oktober 2020 11:16:23 175 Kali Dibaca

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SEKAR
NOMOR 05 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SEKAR
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	36.089.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.227.528.145,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	440.731,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.264.064.876,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	537.498.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	786.316.145,00	
5.3.	Belanja Modal	1.890.181.900,00	
5.4.	Belanja Tidak Terbagu	63.088.781,00	
	JUMLAH BELANJA	3.266.964.426,00	

INFO UMUM

PERANTARAN KEMAS
Pembangunan Desa
KEMAS KEMAS
SIAP Desa

PETA DESA

Kec. Sekar
Lihat peta lebih besar

Gambar 5 Muatan APBDes Sekar pada Website Desa

Sumber: Pemerintah Desa Sekar (2023)

C. Akuntabilitas Kelembagaan Desa

Akuntabilitas kelembagaan desa mencakup sejumlah praktik dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga di tingkat desa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas. Di Desa Sekar sendiri terdapat beberapa lembaga desa yang memiliki beragam fungsi dan peran dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa, diantaranya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam hal ini, publikasi profil Lembaga-lembaga yang ada di desa perlu untuk dilakukan guna meningkatkan transparansi, memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat, dan mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses Pembangunan desa.

Desa Sekar adalah desa yang terdiri dari 5 dusun, yaitu Dusun Kalipapak, Grendjengan, Kedung Nongko, Gendongan, dan Sekar. Adapun nama masing-masing ketua RT dan RW adalah sebagai berikut:

DAFTAR NAMA-NAMA KETUA RUKUN TETANGGA (RT)
DESA SEKAR, KECAMATAN SEKAR, KABUPATEN BOJONEGORO

No	Nama Ketua RT	Pekerjaan	Kedudukan
1.	Andik Tri Maryono	Wiraswasta	Ketua RT 01
2.	Saekan Rowi	Petani	Ketua RT 02
3.	Rasit Rahman	Petani	Ketua RT 03
4.	Umar Suyatno	Petani	Ketua RT 04
5.	Dwi Jatmiko	Wiraswasta	Ketua RT 05
6.	Sadran	Petani	Ketua RT 06
7.	Moch. Sunjan	Petani	Ketua RT 07
8.	Radi	Petani	Ketua RT 08

INFO UMUM

PERANTARAN KEMAS
Pembangunan Desa
KEMAS KEMAS
SIAP Desa

PETA DESA

Kec. Sekar
Lihat peta lebih besar

Gambar 6 Muatan Lembaga Desa yang dimuat dalam website desa

Sumber: Pemerintah Desa Sekar (2023)

Setelah adanya pendampingan dalam memasukkan profil lembaga-lembaga desa yang ada ke dalam website desa, tampilan pada sub-menu kelembagaan desa tidak lagi kosong dan terdapat profil Lembaga-lembaga tersebut secara rinci. Pemunculan profil ini penting guna mengetahui secara detail Lembaga apa saja yang ada dalam desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembangunan komunitas. Informasi yang rinci mengenai lembaga-lembaga desa tersebut juga akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada warga masyarakat, memfasilitasi kolaborasi, dan memperkuat rasa kepemilikan bersama terhadap inisiatif pembangunan di tingkat desa. Dengan demikian, pemunculan profil tersebut bukan hanya

menjadi sarana dokumentasi, tetapi juga menjadi alat penting dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan.

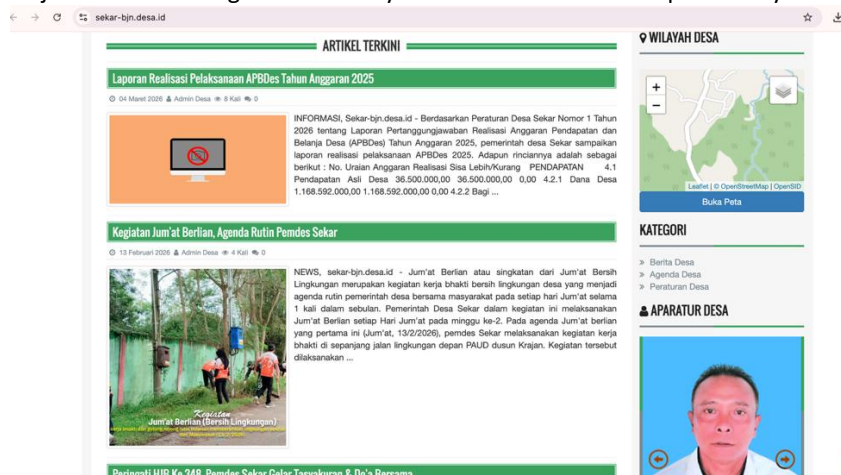
Akuntabilitas lembaga-lembaga desa dapat tercermin melalui keberadaan platform musyawarah desa, khususnya dalam konteks musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes merupakan forum partisipatif yang melibatkan berbagai stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan desa, termasuk unsur pemerintah desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga desa secara umum. Selain itu, Musrenbangdes juga merupakan wujud nyata dari prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Dengan memberikan ruang partisipasi kepada warga desa, lembaga desa bertanggung jawab untuk menyajikan informasi yang akurat, terkini, dan mudah dipahami mengenai rencana pembangunan desa. Transparansi dalam penyediaan informasi tersebut memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan menilai kinerja lembaga desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa (Lilis et al., 2020)

D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Meningkatkan Akuntabilitas Publik melalui Tata Kelola SID

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil kegiatan pendampingan dan implementasi tata kelola SID di Desa Sekar, terdapat beberapa faktor yang mendukung peningkatan akuntabilitas publik, antara lain:

- Komitmen dan Respons Positif Pemerintah Desa. Kepala desa beserta perangkat desa menunjukkan respons yang positif terhadap kegiatan pendampingan, khususnya dalam penyusunan dan pembaruan profil desa. Dukungan ini menjadi faktor penting karena mencerminkan adanya komitmen kelembagaan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui media digital.
- Pendampingan Teknis yang Berkelanjutan. Adanya pendampingan langsung kepada operator desa dalam mengelola website menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Pendampingan ini memungkinkan operator desa untuk memahami pengelolaan konten, pembaruan data, serta optimalisasi fitur SID secara berkelanjutan.
- Ketersediaan *Platform Website* Desa sebagai Media Transparansi. Website desa sebagai bagian dari SID menjadi sarana strategis dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Keberadaan menu profil desa, dokumen perencanaan (RPJMDes dan RKPDes), serta APBDes memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi secara terbuka dan cepat. Selain itu, hingga saat ini pemerintah desa juga telah mengelola website desa dengan baik sesuai dengan arahan pelatihan, yang ditunjukkan melalui ketersediaan platform website desa sebagai media transparansi, di mana website desa sebagai bagian dari SID menjadi sarana strategis dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.



Gambar 7 Update SID Desa Sekar Tahun 2026

Sumber: <https://sekar-bjn.desa.id/>

Gambar 7 di atas menunjukkan bahwa website desa telah dikelola dengan cukup baik dan aktif, ditunjukkan dari adanya menu "Artikel Terkini" yang memuat informasi terbaru seperti Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2025 serta kegiatan rutin desa seperti *Jum'at Berlian*. Tampilan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah melakukan pembaruan informasi secara berkala, sehingga website berfungsi sebagai media transparansi dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Selain itu, adanya kategori informasi dan tampilan yang terstruktur juga memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi terkait kegiatan dan administrasi desa.

- d. Digitalisasi Dokumen dan Informasi Desa. Proses digitalisasi data seperti profil desa, dokumen perencanaan pembangunan, dan informasi kelembagaan desa mendukung terciptanya sistem informasi yang lebih tertata dan mudah diakses. Hal ini meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat prinsip akuntabilitas.
- e. Pengembangan Konten Informatif dan Promotif. Selain aspek teknis, pengembangan konten berupa artikel dan poster terkait potensi desa (pariwisata dan budaya) turut mendukung pemanfaatan SID secara optimal. Konten ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga berfungsi sebagai media promosi desa.
- f. Keterlibatan Lembaga Desa dan Partisipasi Masyarakat. Publikasi profil lembaga desa seperti BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, dan BUMDes mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu, forum musyawarah desa (musrenbangdes) menjadi wadah partisipatif yang memperkuat akuntabilitas kelembagaan.

2. Faktor Penghambat

Di samping faktor pendukung, berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas publik melalui tata kelola SID, yaitu:

- a. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan aparatur desa, khususnya operator website, dalam mengelola SID. Hal ini menyebabkan website desa sebelumnya tidak terkelola dengan baik dan cenderung terbengkalai.
- b. Kurangnya Pemahaman tentang Pentingnya Transparansi Digital. Tidak semua perangkat desa memiliki kesadaran yang sama mengenai pentingnya keterbukaan informasi melalui media digital. Hal ini dapat menghambat optimalisasi penggunaan SID sebagai sarana akuntabilitas publik.
- c. Keterbatasan Infrastruktur dan Pengelolaan Teknologi. Kendala teknis seperti keterbatasan akses internet, perangkat pendukung, serta kemampuan teknis dalam pengelolaan website menjadi hambatan dalam implementasi SID secara optimal.
- d. Belum Optimalnya Integrasi Data dan Sistem Informasi. Pengelolaan data desa yang masih tersebar dan belum terintegrasi secara sistematis dapat menyulitkan dalam penyajian informasi yang komprehensif dan akurat kepada publik.
- e. Partisipasi Masyarakat yang Masih Terbatas. Meskipun telah tersedia informasi melalui website desa, tingkat partisipasi masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan informasi tersebut masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan literasi digital masyarakat.

KESIMPULAN

Pengelolaan SID dengan baik mampu membuka jendela transparansi dengan menyediakan akses informasi yang lebih mudah bagi masyarakat. Efisiensi administrasi desa juga terdongkrak melalui SID yang memberikan sistem manajemen data terintegrasi, mempercepat proses pengumpulan, pengolahan, dan distribusi informasi. Penerapan SID juga menjadikan pemerintah desa lebih akuntabel dengan memungkinkan pelacakan dan verifikasi pengeluaran serta keputusan desa. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui SID terwujud melalui akses informasi yang lebih baik, memungkinkan kontribusi yang lebih signifikan dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan desa. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan keterbatasan literasi digital perangkat desa. Saran yang penulis berikan adalah meningkatkan literasi digital aparat pemerintah desa melalui pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika secara berkelanjutan. Rekomendasi yang Penulis berikan untuk kegiatan pengabdian selanjutnya adalah memperkuat kapasitas masyarakat dalam menggunakan SID, melibatkan penuh pihak-pihak terkait, dan mengembangkan kebijakan yang mendukung implementasi SID secara berkelanjutan. Selain itu, perlu dilakukan kegiatan monitoring perkembangan pada periode tertentu untuk mengetahui keberlangsungan pengelolaan website desa. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa SID memiliki potensi signifikan untuk memperbaiki akuntabilitas publik di tingkat desa, memberikan manfaat nyata bagi pemerintah desa dan masyarakat Desa Sekar.

REFERENSI

1. Airlangga, P., & Abdullah, R. (2020). Pembuatan dan Pelatihan Pengoperasian Website Desa Agrowisata Gondangmanis. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BIDANG INFORMATIKA*, 1(1), 2774–8529.
2. Ariadi, A. (2019). PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA. *Meraja Journal*, 2(2), 135–147.

3. Ashoumi, H., Hariono, T., Dzikrul, M., Al-Ghozali, H., & Wardani, D. (2023). Socialization of Automatic Distance Sensor Technology Implementation in Charity Boxes. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 115–122. <https://doi.org/10.32734/abdimastalenta.v8i1.7835>
4. Cahyono, M., Saputra, N. D., & Saputra, A. I. (2023). TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAHAN: PERUBAHAN ORGANISASI DAN BUDAYA PEMERINTAHAN MELALUI TEKNOLOGI DIGITAL. *JURNAL TEKNOLOGI INFORMASI MURA*, 15(2), 92–100. DOI 10.32767/JTI.V15I2.2123
5. Fitri, L. E., Setiawan, D., Utomo, P. E. P., & Bhayangkari, S. K. W. (2021). Penerapan Sistem Informasi Desa Berbasis TIK Di Desa Nyogan Menuju Tata Kelola Good Governance Dan Kemandirian Desa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(3), 494–503. <https://doi.org/10.22437/jkam.v4i3.11568>
6. Hariono, T., Putra, C., & Chabibullah, M. W. (2020). Penerapan Website Opensid untuk Menginformasikan Profil dan Potensi Desa Banjarsari. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BIDANG INFORMATIKA*, 1(1), 2774–8529.
7. Harjanti, I. M. (2020). PENYUSUNAN PROFIL DESA SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN DATA DI DESA PENGKOL, KECAMATAN TANON, KABUPATEN SRAGEN. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 01(03), 211–216. <https://doi.org/10.14710/jpv.2020.7324>
8. Hertati, D., Nurhadi, N., & Arundirasari, I. (2022). Pemanfaatan Sistem Informasi Desa untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa. *Berdikari: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 10(2), 236–248. <https://doi.org/10.18196/berdikari.v10i2.13610>
9. Ira Megasyara, & Amrizal Imawan. (2023). Implementasi Good Government Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 13(2), 512–528. <https://doi.org/10.22219/jrak.v13i2.23525>
10. Iswanto, D. (2021a). Peran Pemerintah Daerah Dalam Membangun Literasi Digital Aparatur Pemerintah Desa dalam Membangun Smart Village Governance (Studi di Desa Mentoro Kecamatan Soko Kabupaten Tuban). *Seminar Nasional Pendidikan LPPM IKIP PGRI Bojonegoro*, 10. <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/Prosiding/article/view/1146/450>
11. Iswanto, D. (2021b). Realizing Inclusive Public Services: “Lapo Bra” Innovation in Building a Literacy Culture for Persons with Disabilities in Malang. *SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, & Social Inclusion's Studies*, 4(1), 71–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.36625/sj.v4i2.87>
12. Iswanto, D. (2022). Smart Village Governance Through the Village Information System in Tuban Regency. *Natapraja*, 10(1), 44–57. <https://doi.org/10.21831/natapraja.v10i1.46619>
13. Iswanto, D., Miskan, D. E. P. Z., & Solikha, W. S. (2024). *Public Sector Digital Transformation: Analysis of Digital Literacy of Government Apparatus in Kepatihan Village, Menganti District, Gresik Regency*. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jpap.v10i2.11732>
14. Iswanto, D., & Putra, R. A. (2023). Evaluation of Bureaucratic Reforms in Realizing World Class Government in Tuban. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 139–156. <https://doi.org/10.20961/sp.v18i2.72811>
15. Julkarnain, M., Made Widiarta, I., Akhir Putra, J., Sasmita Susanto, E., Mulyanto, Y., Hamdani, F., Esabella, S., Dery Sofya, N., Idifitriani, F., & Ismiyarti, W. (2023). Sosialisasi Sistem Informasi Desa (Open SID) Dalam Menunjang Pelayanan Masyarakat Pada Desa Marga Karya. *Jurnal Pengabdian Rekayasa Sistem*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36761/jpres.v1i2.3005>
16. Kurniawan, R., Yonggi Puriza, M., Arkan, F., Teknik Elektro, J., Teknik, F., Bangka Belitung, U., & Bangka Belitung Korespondensi, K. (2021). Membangun Sistem Informasi Desa untuk Pelayanan Publik Prima Berbasis Cloud Server di Desa Pagarawan Kabupaten Bangka. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 193–200. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>
17. Landa, K., & Greenberg, J. A. (2024). Good Governance. In *The SAGES Manual of Strategy and Leadership* (pp. 553–562). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-62359-2_38
18. Lilis, S., Napisah, D., Cecep, T.-S., & Ekuitas, B. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2).
19. Madjid, U. (2024). Quality of Public Services: The Role of State Civil Apparatus in Realizing Good Governance. *Journal of Ecohumanism*, 3(7). <https://doi.org/10.62754/joe.v3i7.4590>
20. Mais, R., & Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(1), 57–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66>
21. Mardinata, E., Cahyono, T. D., & Muhammad Rizqi, R. (2023). Transformasi Digital Desa Melalui Sistem Informasi Desa (SID): Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 73–81. <https://doi.org/10.38043/parta.v4i1.4402>

22. Miles, M. B., Michael Huberman, A., Saldaña, J., & Ridder, H. G. (2014). Qualitative data analysis. A methods sourcebook. *Zeitschrift Fur Personalforschung*.
23. Pemerintah Desa Sekar. (2023). *Website Resmi Desa Sekar*. 2023. <https://sekar-bjn.desa.id/artikel/2023/7/25/rpjm-desa>
24. Praseptiawan, M., Dwi Nugroho, E., & Iqbal, A. (2021a). Pelatihan Sistem Informasi Desa untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Digital Perangkat Desa Taman Sari. *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 521–528. <https://doi.org/https://doi.org/10.35568/abdimas.v4i1.1206>
25. Praseptiawan, M., Dwi Nugroho, E., & Iqbal, A. (2021b). Pelatihan Sistem Informasi Desa untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Digital Perangkat Desa Taman Sari. *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 521–528. <https://doi.org/https://doi.org/10.35568/abdimas.v4i1.1206>
26. Praseptiawan, M., Nugroho, E. D., & Iqbal, A. (2021). Pelatihan Sistem Informasi Desa untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Digital Perangkat Desa Taman Sari. *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 521–528. <https://doi.org/10.35568/abdimas.v4i1.1206>
27. Prihatiningtyas, S., Fahimah, atul, Ayu Sekar Pertiwi, N., Fitri Fajriyah, L., & Nur Fatikha, L. (2020). Optimalisasi Web Desa Mojokambang sebagai Upaya Mempermudah Akses Informasi Penduduk Desa Mojokambang. *Jumat Informatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 29-34, 1(1), 2774–8529.
28. Pujihartati, S. H., Amila Mahmudah, H., Pratiwi, G., Ameilia Ridhani, H., Aulia Alfarisi, I., Jeremia Sarjono, I., Ferli Angga, I., Nur Safitri, I., Auri, Z., Anjani, F., & Nissa Ardalia, E. (2022). Digitalisasi Profil Desa Turus. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(2), 338–346. <https://doi.org/10.30653/002.202272.91>
29. Putra, A. A. A. , Widakdo, D. T. , & Sasmita, R. F. (2022). Sosialisasi Sistem Informasi Desa Berbasis Web (Open Sid) Pada Desa Jati Indah Tanjung Bintang Lampung Selatan. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.30605/atjpm.v4i1.1966>
30. Putra, G. B., & Atmaja, E. J. J. (2021). Pedampingan Penggunaan Sistem Informasi Profil Desa Banyuasin Berbasis Internet Dan Aplikasi Mobile. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 4(1), 97–102. <https://doi.org/10.33330/jurdimas.v4i1.897>
31. Putu, N., & Widanti, T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.11>
32. Rasyid, H. A. N., & Rahmawati, D. E. (2023). Pengelolaan Website Desa untuk Optimalisasi Data Potensi Desa dalam Sistem Informasi Desa (SID). *JCOMMENT (Journal of Community Empowerment)*, 4(1), 14–21. <https://doi.org/10.55314/jcment.v4i1.497>
33. Riwukore, J. R., Habaora, F., & Terttiaavini, T. (2022). Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1974>
34. Rolania Batubara, E., & Helmy, H. (2019). Analisis Pengembangan Electronic Government Melalui Penyelenggaraan Website Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 1(4), 1666–1686. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i4.169>
35. Rosmalina, Muharam, Y., & Larasanti, marena. (2023). SISTEM INFORMASI PENGARSIPAN SURAT BERBASIS WEB DI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) KECAMATAN WANAYASA. *JurnalSistemInformasi*, 5(1).
36. Sari, I. K., Said, M., & Rahmawati, S. D. (2022). PENERAPAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH DAERAH BOJONEGORO PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Respon Publik*, 16(10), 40–51.
37. Sugianto. (2023). *PERAN DESA DIGITAL DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS PARIWISATA DI DESA SIDOMULYO, KECAMATAN SILO, KABUPATEN JEMBER* [Skripsi]. UIN KHAS Jember.
38. Sumanjoyo Hutagalung, S., Hermawan², D., & Mulyana, N. (2020). *Website Desa sebagai Media Inovasi Desa di Desa Bernung Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung*. 5(2), 299. <https://doi.org/10.30653/002.202052.304>
39. Supiyandi, S., Rizal, C., Zen, M., & Eka, M. (2022). PELATIHAN PERANGKAT DESA DALAM PENERAPAN METODE WATERFALL PADA SISTEM INFORMASI DESA. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 2346. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.8533>
40. Surahman, A., Rosmala Sari, T. D., Andraini, L., & Ismail, I. (2023). Pelatihan Pengelolaan Website Desa. *Journal of Engineering and Information Technology for Community Service*, 1(3), 104–108. <https://doi.org/10.33365/jeit-cs.v1i3.187>
41. Suryani, A. D. (2019). Peran Pemerintah Desa Panggungharjo Bantul Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa. *JPALG*, 3(1), 52–69. <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/publicadmini>

42. Wijayati, D. T. , Witjaksono, A. D. , Juniarti, R. P. , Kusumaningrum, T. M. , & Ridlwan, A. A. (2019). PENINGKATAN DAYA DUKUNG PEMERINTAHAN DESA MELALUI MANAJEMEN SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS WEBSITE. *J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 47-52, 3(1), 47–52. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30734/j-abdipamas.v3i1.159>